



**RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH**

Tahun Anggaran 2023

DINAS SOSIAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DINAS SOSIAL

Jl. Mayjend D.I. Panjaitan No. 12

Telp. (0536) 3221582 Fax. (0536) 3224185

PALANGKA RAYA 73112

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas PerkenanNya telah Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2023 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dapat disusun dan diselesaikan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2023 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah ini dengan memperhatikan target dan sasaran yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2021-2026 terutama dalam rangka mengatasi dan menjangkau keseluruhan permasalahan sosial yang belum terjangkau akses pelayanan sosial. Secara umum rencana kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah ini telah berupaya agar mampu memberdayakan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Provinsi Kalimantan Tengah secara efektif dan efisien.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun Anggaran 2023 ini disusun sebagai bahan pengukuran kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah melalui Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial yang akan dilaksanakannya untuk Tahun Anggaran 2023.

Demikian Rancangan Akhir Rencana Kerja ini ini disusun, semoga bermanfaat bagi pelaksanaan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan terima kasih.

Palangka Raya, Mei 2022

Plt. Kepala Dinas,



Dr. NOOR HALIM, S.Pd., M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19690702 199512 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD	7
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan PD	16
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	19
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	22
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari masyarakat....	49
BAB III TUJUAN dan SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Tujuan dan sasaran Renja PD	52
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	62
BAB V PENUTUP	89

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah (P-Renja PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) yang disusun untuk periode tahunan yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dan ditetapkan oleh kepala daerah setelah RKPD ditetapkan. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 disusun berdasarkan pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, serta tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD dan tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, Rencana Strategis (Renstra) PD tahun 2021-2026 yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023, sehingga penyusunan Renja Akhir PD dilakukan secara simultan/paralel dengan Penyusunan Rancangan Akhir RKPD.

Renja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 disusun untuk memberikan gambaran tentang program, kegiatan dan sub kegiatan yang mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Kepmendagri 050-5889 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Daerah yang akan dilaksanakan selama Tahun 2023 sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah, dengan demikian akan dapat memberikan gambaran tentang arah dan tujuan program, target kinerja yang akan dicapai serta kegiatan pelayanan sosial yang akan dilaksanakan.

Penyusunan Renja Dinas Sosial merupakan proses penyusunan perencanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan anggaran Dinas Sosial pada Tahun Anggaran 2023 sehingga program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang di dalam Renja akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2023.

Renja Dinas Sosial Tahun 2023 adalah dokumen rencana kerja perencanaan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Provinsi Kalimantan Tengah dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2023 dan juga sebagai upaya pemulihan dari dampak **Corona Virus Disease 19** baik dari aspek ekonomi, kesehatan dan sosial masyarakat. Kegiatan-kegiatan prioritas yang tertunda pelaksanaannya di tahun 2022 karena *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan *Corona Virus Disease 19* dilanjutkan Tahun 2023 guna mendukung pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah yang lebih baik lagi.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang Undang Dasar 1945 Pasal 27 dan 34.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Perubahan Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Negara Republik Indoensia Nomor 1622).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1964 tentang Penetapan Penghargaan dan Pembinaan Terhadap Pahlawan.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4286).
7. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Penerimaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).
 12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
 13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
 15. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
 16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
 17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
 18. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
 19. Peraturan Pemerintah 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664).
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).

24. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133).
25. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310).
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD dan tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538).
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
31. Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
32. Kepmendagri 050-5889 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Daerah
33. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
34. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor: 111/HUK/2009 tentang Indikator Kinerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial.
35. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah.

36. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah provinsi Kalimantan Tengah tahun 2010 Nomor 4, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34).
37. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
38. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.
39. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Dinas Sosial dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Sosial untuk Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial.

2. Tujuan

- a. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2023 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan.
- b. Memberikan gambaran tentang perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun anggaran 2023.
- c. Merencanakan target dan sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dicapai dalam Perubahan Renja PD Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2023.
- d. Sebagai dokumen perencanaan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023 ini, disusun terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU, memuat evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah tahun lalu dan Renstra perangkat daerah, Analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH, memuat Telaah terhadap kebijakan nasional, Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah dan Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, memuat uraian tentang garis besar rekapitulasi program dan kegiatan serta faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

BAB V PENUTUP memuat tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pada Tahun Anggaran 2022, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah mengelola anggaran APBD untuk belanja langsung sebesar Rp. 13.576.269.840 dan belanja tidak langsung sebesar Rp. 18.275.935.160, sehingga jumlah pagu anggaran Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp. 31.852.205.

Penyerapan anggaran yang dicapai pada akhir bulan April Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 4.839.696.068 atau 15,19 % dengan realisasi fisik 20%. Secara terperinci, penggunaan dana untuk melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial di Provinsi Kalimantan Tengah pada sampai dengan bulan April Tahun Anggaran 2022, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DANA (Rp.)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)
			Rp.	%	
1	2	3	4	5	6
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	22.250.167.533			
I	Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	255.502.400	10.326.750	4,58	6,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah	25.000.000	-	-	5,00
2	Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi SKPD	25.000.400	-	-	5,00
3	Evaluasi Kinerja SKPD	205.502.000	10.326.750	5,03	100
ii	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13.907.829.840			
4	Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN	13.576.269.840	2.149.647.556	15,83	17,00
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	331.560.000	67.550.000	20,37	22,00
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	13.000.000			
6	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	13.000.000	-	-	-
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	270.891.910	17.724.200	6.54	8,00
7	Diklat Kepegawaian berdasarkan Tugas & Fungsi	72.158.600	17.724.200	24,56	26,00
8	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	198.733.310	-	-	-

V	Administrasi Umum Pemerintah Daerah	827.396.429	186.112.017	22,50	25,00
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	113.983.500	30.503.000	26,76	30,00
10	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	92.935.500	24.157.000	25,99	28,00
11	Pengadaan Barang Cetak & Penggandaan	93.600.000	27.298.500	29,17	32,00
12	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	136.016.779	6.640.000	4,88	10,00
13	Fasilitasi Kunjungan Tamu	20.000.000	3.762.500	18,81	20,00
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	340.842.650	93.751.017	27,50	30,00
15	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Pada SKPD	30.000.000	-	-	-
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	3.456.888.474			
16	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	507.660.474	506.000.000	99,67	100
17	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.549.228.000	129.866.000	5,09	10,00
188	Pengadaan Sarana & Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	400.000.000	-	-	-
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.583.899.800	464.929.626	17,99	20,00
18	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	16.000.000	5.200.000	32,50	35,00
19	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	583.333.000	135.127.057	23,16	25,00
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.984.566.800	324.602.569	16,36	20,00
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	934.758.680			
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	300.000.000	82.896.400	27,63	30,00
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor & Bangunan Lainnya	554.758.680	-	-	-
23	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana & Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.000.000	19.890.000	24,86	27,00
II	Program Pemberdayaan Sosial	812.784.854	139.637.800	17,18	20,00
IX	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	43.210.250	5.630.000	13,01	15,00
24	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang dan Barang	43.210.250	5.630.000	13,01	15,00
IX	Pemberdayaan Sosial Potensi Sumber Sosial Provinsi	769.574.604	134.007.800	17,41	20,00
25	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi	45.021.900	-	-	-

26	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi	190.243.100	17.540.000		
27	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	534.309.604	116.467.800		
III	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	183.787.850	14.415.000	7,84	10,00
X	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	183.787.850	14.415.000	7,84	10,00
28	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	183.787.850	14.415.000	7,84	10,00
IV	Program Rehabilitasi Sosial	6.010.808.870			
XI	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti	976.192.300	147.139.750	15,07	18,00
29	Penyediaan Permakanan	304.520.000	61.361.000	20,15	22,00
31	Penyediaan Sandang	24.900.000	-	-	-
32	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	20.000.000	3.469.750	17,35	20,00
33	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual & Sosial	45.750.000	6.565.000	13,70	15,00
34	Pemberian Aktivitas Hidup Sehari-hari	49.400.000	11.650.000	23,58	25,00
35	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	91.325.000	29.087.000	31,85	33,00
36	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	27.184.000	2.240.000	8,24	10,00
37	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	27.151.000	3.930.000	14,47	16,00
38	Koordinasi & Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	385.962.300	28.837.000	7,47	10,00
XII	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar dalam Panti	3.446.486.650			
39	Pengasuhan	88.758.300	54.116.248		
40	Penyediaan Makan	3.059.267.450	3.312.000		
41	Penyediaan Sandang	20.000.000	-	-	-
42	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	16.370.000	-	-	-
42	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	4.868.500	-	-	-
43	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	11.400.000	-	-	-
44	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	35.975.000	-	-	-
45	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	2.2000.000			

46	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	41.191.200	27.526.323	66,83	
47	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	41.272.200	10.370.000	25,13	
48	Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Pengganti	10.500.000	-	-	-
49	Koordinasi, Sinkronisasi & Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	114.684.000	16.677.500	14,54	17,00
XIII	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar dalam Panti	1.125.266.070	248.972.898	22,12	25,00
50	Penyediaan Permakanan	734.169.700	149.524.850	20,37	22,00
51	Penyediaan Sandang	28.100.000	14.591.000	51,93	53,00
52	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	14.197.000	6.677.000	47,03	50,00
53	Penyediaan Alat Bantu	8.899.843	-	-	-
54	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Sosial	26.000.000	1.996.548	7,68	10,00
55	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	9.800.000	2.400.000	24,48	26,00
56	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	7.500.000	-	-	-
57	Fasilitasi Pembuatan NIK bagi Penyandang Disabilitas	3.620.000	-	-	-
58	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	12.570.120	5.694.000	45,29	48,00
59	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	46.549.500	6.789.000	14,58	17,00
60	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	46.974.000	6.875.000	14,64	17,00
61	Pemulasaraan	66.600.000	27.778.000	41,71	43,00
62	Koordinasi, Sinkronisasi & Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	129.106.500	26.647.500	20,64	23,00
XIV	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya di Luar HIV/AIDS & NAPZA di Dalam Panti	475.358.850			
63	Penyediaan Permakanan	133.090.250	20.529.200	15,43	17,00
64	Penyediaan Sandang	13.000.000	13.000.000	100	100
65	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	51.640.000	2.665.000	5,16	7,00
66	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	60.466.600	17.794.200	29,43	32,00
67	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	7.631.000	4.585.350	60,08	62,00
68	Pemulangan ke Daerah Asal	88.764.000	25.916.000	29,19	32,00
69	Koordinasi, Sinkronisasi & Pembinaan Pelaksanaan	120.767.000	17.930.000	14,85	16,00

	Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya di Luar HIV/AIDS & NAPZA di Dalam Panti				
V	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.062.602.350			
XV	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	1.062.602.350			
70	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	310.919.250	9.562.500		
71	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	249.798.500	54.261.750		
72	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	501.884.600	-	-	-
VI	Program Penanganan Bencana				
XVI	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	1.330.737.950	266.993.000	20,06	22,00
73	Penyediaan Permakanan	199.995.200	-	-	-
74	Pelayanan Dukungan Psikososial	1.130.742.750	266.993.000	23,61	25,00
VII	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan				
XVII	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	180.000.000	109.349.000	60,75	63,00
75	Rehabilitasi Sarana & Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	100.000.000	98.933.000	98,93	100,00
76	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	80.000.000	10.416.000	13,02	15,00
	J U M L A H	31.852.205.000	4.839.696.068	15,19	20,00

Pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2021 adalah :

□ **Tujuan 1 : Meningkatnya Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)**

Program		Indikator Kinerja	Kelompok Sasaran
1	2	3	
1.	Program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani	PPKS
	warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah provinsi untuk dipulangkan ke daerah kabupaten/kota	1 Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah yang mendapatkan pelayanan	100 Orang
2.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang teratasi	PPKS

a	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	1	Jumlah klien disabilitas yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	26 orang
b	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar dalam panti	2	Jumlah klien anak terlantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	40 Orang
c	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar dalam panti	3	Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	73 Orang
d	Rehabilitasi sosial bagi penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	4	Jumlah wanita rawan sosial ekonomi yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	16 Orang
3	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan sosial	PPKS
	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi	1	Tersalurkannya bantuan sosial bagi keluarga miskin	14 Kab/Kota
4	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial provinsi		Persentase korban bencana yang tertangani	PPKS
	Program Penanganan Bencana	1	Persentase korban bencana yang tertangani	100 %

□ Tujuan 2 : Meningkatkan peran serta PSKS dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial di Kalimantan Tengah

No	Program	Indikator Kinerja		Target
1	Program Pemberdayaan Sosial		PSKS yang diberdayakan	PPKS
A	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	1	Terlaksananya Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Provinsi	100 %
b	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	2	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan (TMP)	1 Unit TMP

□ Tujuan 3 : Terpenuhinya pemberian bantuan kepada masyarakat miskin

Program		Indikator Kinerja		Target
1.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	a.	Persentase penduduk miskin perdesaan	5,3 %
		b.	Persentase penduduk miskin perdesaan	4,8%
		c.	Persentase fakir miskin yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkat keberfungsian sosialnya	30%
a	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi	1	Jumlah Kepala Keluarga yang mendapatkan bantuan KUBE	220 KK

b	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	2	Terlaksannya Kegiatan Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Data Fakir Miskin di Kalimantan Tengah	14 Kab/Kota
---	---	---	---	-------------

Secara keseluruhan, target pelaksanaan Renja Tahun 2021 khususnya yang bersumber dana APBD sampai dengan 2021 dapat tercapai, dan dapat diketahui dari pencapaian fisik sebagai berikut.

Tabel 2.2
Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD
Provinsi Kalimantan Tengah

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021	Target dan realisasi kinerja program kegiatan Tahun 2021			Target program / kegiatan Renja PD tahun 2022	Perkiraan realisasi capaian target program/kegiatan Renstra SKPD s/d tahun 2022	
				Target Renja SKPD 2021	Realisasi Renja PD 2021	Tingkat Realisasi (%)		realisasi capaian prog dan keg s/d tahun 2022	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1. URUSAN WAJIB									
1.06 BIDANG URUSAN SOSIAL									
PROGRAM PENANGANAN WARGA MIGRAN	Program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	80 %	80 %	85 %	47,02 %	47,02%	85%		
Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dan titik debaraksi di daerah provinsi untuk dipulangkan ke daerah kabupaten/kota	Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debaraksi di daerah yang mendapatkan pelayanan	700 org	100 org	100 org	47 org	47,02	150 org	297 org	42,43%
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang teratasi	80%	80%	80%	80%	80%			
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Jumlah klien disabilitas yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	240 org	10 Org	10 org	10 org	100 %	20 org	40 org	16,67 %
Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar dalam panti	anak terlantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	12430 org	2102 org	2102 org	2102 org	100 %	1265 org	5496 org	43,99 %

Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar dalam panti	Jumlah lanjut usia terlantar yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	465 org	73 org	73 org	73 org	100 %	65 org	211 org	45,38 %
Rehabilitasi sosial bagi penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti	Jumlah wanita rawan sosial ekonomi yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar	140 org	40 org	27 org	27 Org	100 %	40 org	107 org	76,43 %
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan sosial	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			
Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi	Tersalurkannya bantuan sosial bagi keluarga miskin	265.000 KPM	50.500 KPM	51.000 KPM	54.302 KPM	106,47%	52.00 KPM	156.802 KPM	59,17 %
Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang tertangani	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			
Perlindungan korban bencana alam dan sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang tertangani	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang meningkat kemampuannya dalam menangani masalah kesejahteraan sosial	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %	75 %	71,66	71,66 %
Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah pengawasan izin PUB/UGB di 14 Kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota	14 kab/kota	100 %	14 kab/kota	14 kab/kota	100 %
Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	Terlaksananya Program Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Provinsi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan (TMP)	1 unit	1 unit	1 unit	100 %	1 unit	1 unit	1 unit	100 %

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Mengacu Peraturan Menteri Sosial RI tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Layanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Minimal.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Adapun jenis pelayanan dasar daerah provinsi meliputi :

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas dalam panti
- b. Rehabilitasi sosial anak terlantar di dalam panti
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi

2. Indikator, Nilai SPM, Target Daerah serta Batas Waktu Pencapaian SPM Secara Nasional serta Realisasi

Nilai Rata-Rata Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 adalah 80 % belum memenuhi target yang ada di dalam renstra disebabkan karena ada satu elemen pada SPM yang tidak bisa dilaksanakan karena tidak terdapat sarana dan prasarana Panti Sosial gelandangan pengemis di Provinsi Kalimantan Tengah dengan rincian serta jenis pelayanan tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Tahun Pencapaian	Capaian	
				Target Renstra (%)	Realisasi tahun 2020 (%)
1	Rehabilitasi sosial dasar	Terpenuhinya kebutuhan	2021	82	100

	penyandang disabilitas dalam panti	dasar penyandang disabilitas dalam panti			
		Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti			
2	Rehabilitasi sosial anak terlantar di dalam panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar anak terlantar dalam panti	2021	82	100
		Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti			
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar lanjut usia dalam panti	2021	82	100
		Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan			

		dasarnya di dalam panti			
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis dalam panti	2021	-	-
		Persentase (%)kebutuhan dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis dalam panti			
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana provinsi	2021	82	100
		Persentase (%) korban bencana provinsi yang terpenuhi kebutuhan dasarnya			
Nilai Rata-Rata Capaian SPM Dinas Sosial tahun 2021 (%)					80%

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

a. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial.

Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah serta Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.

Adapun tugas pokok tersebut diatas, yang menjadi tanggung jawab dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut :

- Penyelenggaraan kerjasama Bidang Pemberdayaan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Penanganan Fakir Miskin.
- Meningkatnya angka kemiskinan di perkotaan di bandingkan di pedesaan pada Tahun 2021.
- Masih belum optimalnya cakupan layanan kesejahteraan sosial dan kinerja pelayanan sosial di pusat-pusat pelayanannya.
- Masih banyaknya desa/kelurahan tertinggal yang belum tertangani secara optimal.
- Semakin kompleksitasnya permasalahan kesejahteraan sosial, yang memerlukan penanganan secara terus menerus dalam rangka menekan timbulnya permasalahan baru.

b. Permasalahan, hambatan dan Tantangan

- Belum terlaksananya pendataan secara baik dan benar di setiap wilayah Kabupaten mengingat tidak adanya struktur dan lembaga yang khusus menangani bidang sosial di Kabupaten-Kabupaten, walaupun ada merupakan lembaga yang baru dan beraneka ragam menyebabkan tidak tersedianya data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang akurat sebagai dasar perencanaan penyusunan program Penanganan Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) serta Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

- Rendahnya pengetahuan/pendidikan ketrampilan Keluarga Binaan Sosial dalam mengelola Kelompok Usaha Bersama (KUBE), sehingga kurang memiliki rasa tanggung jawab maupun kebersamaan sehingga sulit berkembang.
- Organisasi Sosial sebagai pilar partisipasi sosial masyarakat dalam melaksanakan penyantunan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada umumnya masih tergantung pada pemerintah belum mampu mandiri.
- Penyuluhan Sosial sebagai gerak dasar pembangunan Kesejahteraan Sosial belum diimbangi dengan kualitas/kwantitas tenaga penyuluh dan belum terpadunya pelaksanaan penyuluhan.
- Meningkatnya permasalahan sosial disatu pihak dan keterbatasan kemampuan pada Dinas Sosial seperti keterbatasan dana APBD, tenaga pegawai, sarana dan prasarana, organisasi serta kelembagaan di Kabupaten/Kota yang nomenklaturnya berbeda-beda merupakan suatu permasalahan.
- Keterpaduan perencanaan program dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota Propinsi dan Pusat sebagai proses botom up planing untuk menjaring aspirasi masyarakat di daerah belum maksimal.
- Dukungan dana pendamping APBD Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial yang dibiayai dari dana APBN maupun APBD Propinsi masih terbatas.
- Permasalahan Sosial yang menonjol di Provinsi Kalimantan Tengah adalah kemiskinan, dari permasalahan ini mengakibatkan berbagai permasalahan Kesejahteraan Sosial antara lain seperti keterlantaran, ketunaan sosial, tindak kekerasan dan lingkungan sosial yang kumuh dan rawan sosial, kemudian keterpencilan/keterasingan disebabkan faktor geografi dan sulitnya transportasi.
- Faktor penyebaran penduduk yang tidak merata dan rumah/tempat tinggal penduduk yang berjauhan menghambat kerjasama dalam mengelola bantuan secara kelompok.

- Sebagian pemerintah Kabupaten/Kota belum melihat pembangunan Kesejahteraan Sosial sebagai suatu hal yang penting dibanding dengan bidang lain, hal ini dapat dilihat dari komitmen untuk membentuk kelembagaan yang menangani permasalahan sosial di daerah maupun alokasi dana yang disediakan untuk menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- Peran dunia usaha melalui program CSR belum banyak menyentuh pada penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, sehingga perlu didorong dalam rangka mengoptimalkan CSR dalam bidang sosial.
- Belum optimalnya pelaksanaan SPM di Provinsi Kalimantan Tengah khususnya untuk pelayanan SPM gelandangan dan pengemis dikarenakan belum adanya panti gelandangan dan pengemis yang menampung dan melayani klien tersebut.

c. Hambatan dalam melaksanakan visi dan misi sesuai tupoksi

- Dalam setiap pencapaian target yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu, sering tidak dapat dicapai sesuai rencana. Hal ini sering terjadi adanya kebijakan baru yang menyebabkan program/kegiatan tidak dapat dilaksanakan, seperti adanya kebijakan penanganan korban bencana yang merupakan kejadian tidak terduga sehingga tidak dapat dialokasikan dalam rencana kerja.
- Kondisi geografis Kalimantan Tengah terutama dalam penanganan permasalahan sosial di desa tertinggal atau sangat tertinggal yang rata-rata berada di daerah terpencil / sulit dijangkau, sehingga memerlukan pembiayaan operasional yang cukup besar, disatu sisi anggaran yang dialokasikan sangat terbatas, sehingga dalam penanganannya selalu menjadi pertimbangan.

d. Peluang

- Terbitnya Undang-Undang nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial telah memberikan angin segar bagi pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial karena dalam Undang Undang dimaksud berbagai perkembangan permasalahan sosial dan upaya pemecahannya telah disesuaikan dengan kondisi terkini masyarakat Indonesia.

- Peraturan Menteri Sosial RI Nomor : 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/kota akan memberikan arah pelayanan SPM Sosial yang lebih baik dan terukur bagi pelaksanaan Pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial di daerah.
- Terjalannya komunikasi dan koordinasi yang baik antar Dinas Sosial dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota dan intern Dinas Sosial diharapkan mampu mewujudkan yang lebih integratif.
- Dukungan infrastruktur, PSM, Karang Taruna, Orsos, Relawan Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Tokoh Masyarakat maupun lembaga masyarakat, akan sangat membantu dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- Adanya kebijakan daerah terhadap pembangunan Kesejahteraan Sosial menjadikan suatu prioritas baik secara nasional maupun daerah.

e. **Penentuan Isu-isu Strategis**

- Terbuka dan semakin lancarnya transportasi darat antara Provinsi Kalimantan Tengah dengan Provinsi Kalimantan Selatan dan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah juga membawa dampak negatif diantaranya mudahnya terjadi perpindahan PMKS tertentu antar provinsi dan antar Kabupaten/Kota, misalnya untuk PMKS Tuna Susila dan Pengemis.
- Berkembangnya perusahaan besar perkebunan sawit dan pertambangan, tidak hanya berdampak positif, tetapi juga dapat berdampak sosial bagi masyarakat, terutama masalah ketenagakerjaan dan lahan masyarakat yang menjadi sengketa, sehingga berpotensi konflik sosial.
- Melakukan updating Basis Data Terpadu terkait data penerima bantuan, PMKS dan PSKS, BPNT, Verval data PSKS, Verval data PBI Program BPJS, yang disertai dengan by name by adress by need.
- Memperluas jangkauan pelaksanaan program kegiatan sehingga terdapat pemerataan pelayanan kepada masyarakat (PMKS).

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 yang dikaitkan dengan kegiatan yang sama yang akan dilaksanakan

pada Tahun 2023, dapat dikaji beberapa permasalahan yang dianggap penting untuk disempurnakan di masa mendatang yaitu :

- Peningkatan kapasitas untuk pekerja sosial profesional perlu mendapat perhatian yang cukup untuk meningkatkan kinerja dalam melakukan pelayanan. Sehingga dana yang tersedia untuk saat ini perlu ditingkatkan agar seluruh peksos mempunyai kesempatan untuk meningkatkan kemampuannya. Belum optimalnya pendayagunaan sarana dan kapasitas kelembagaan dalam penyusunan perencanaan pembangunan dalam bidang Sosial. Pendayagunaan sarana dan prasarana perkantoran serta kapasitas kelembagaan dirasakan masih kurang optimal. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya pemanfaatan sejumlah peralatan kantor dan gedung secara efektif dan efisien maupun penggunaan tersebut tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Keterbatasan jumlah SDM baik tenaga fungsional maupun staff dan penataan kapasitas kelembagaan masih dirasakan kurang sesuai dengan kebutuhan yang ada yaitu dalam penempatan personil (pegawai) yang kurang sesuai dengan kapasitas masing-masing pegawai tersebut (back ground pendidikan kurang sesuai dengan bidang tugas yang diemban).
- Permasalahan penanggulangan kemiskinan Dinas Sosial sebagai salah satu PD yang diberikan kewenangan dalam penanganan fakir miskin, terutama dalam pengelolaan melalui program dekonsentrasi Kementerian Sosial. Bila dibandingkan dana yang dikucurkan oleh pemerintah pusat, maka jumlah dana APBD Kalimantan Tengah, masih terlalu minim, sehingga perlu peningkatan pelayanan secara kualitas maupun kuantitas yang di dukung oleh dana yang memadai untuk suatu program pemberdayaan masyarakat miskin.
- Sistem dan manajemen pengelolaan data dan informasi secara profesional belum optimal. Kebutuhan akan ketersediaan data dan informasi yang valid dan up to date adalah suatu kebutuhan yang mutlak. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pelayanan akan kebutuhan data dan informasi kepada stakeholders atau pengguna data baik dari lembaga pemerintah pusat, provinsi kabupaten sampai dengan desa/kelurahan serta pihak swasta agar dapat menggunakannya untuk kepentingan masing-masing sehingga memperoleh hasil yang diharapkan. Dinas Sosial, sebagai dinas teknis di bidang sosial, telah berupaya meningkatkan pengelolaan manajemen, penyajian publikasi data dan informasi yang lengkap dan berkualitas

sehingga diharapkan pada akhirnya akan mengurangi kesalahan-kesalahan dalam merumuskan program/kegiatan sehingga perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bidang sosial dapat tepat sasaran.

- Dinas Sosial mempunyai peranan dalam melayani rehabilitasi PMKS, Namun dana yang diberikan oleh APBD daerah belum mencukupi untuk melayani masyarakat yang memerlukan perlindungan dan layanan sosial

TABEL 2.5
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja								Pagu Tahun 2023	Kebutuhan Pagu Tahun 2023	KET		
					Capaian Program		Keluaran kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan								
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target							
1	1.06	Sosial															
	1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi															
	1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
	1.06.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah		Palangka Raya													
	1.06.01.1.01.06	Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi SKPD		Palangka Raya													

1.06.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja SKPD	Palangka Raya						Jumlah Laporan Evaluasi yang tersusun	14 Kab/Kota	200.000.000	250.000.000
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						12 bulan	Terlaksananya administrasi keuangan		14.117.293.084	14.117.293.084
1.06.01.1.02.01	Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN	Palangka Raya					12 bulan	Terselurkannya gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	13.783.929.840	13.783.929.840
1.06.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Palangka Raya					12 bulan	Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 bulan	333.363.244	333.363.244
1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							Terlaksananya administrasi BMD		70.000.000	70.000.000
1.06.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						12 bulan	Tersedianya pengamanan BMD	12 bulan	15.000.000	15.000.000
1.06.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD						12 bulan	Tersedianya Penatausahaan BMD	12 bulan	55.000.000	55.000.000

1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Palangka Raya								300.000.000	700.000.000
1.06.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Palangka Raya								-	20.000.000
1.06.01.1.05.09	Diklat Kepegawaian berdasarkan Tugas & Fungsi	Palangka Raya								100.000.000	200.000.000
1.06.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Palangka Raya								200.000.000	400.000.000
1.06.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Palangka Raya								-	80.000.000
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Pemerintah Daerah						12 bulan			940.750.000	1.035.842.650

1.06.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Palangka Raya						Jumlah komponen listrik yang tersedia	12 bulan	115.000.000	175.000.000
1.06.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Palangka Raya						Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	12 bulan	120.000.000	125.000.000
1.06.01.1.06.05	Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan							Jumlah barang cetakan & penggandaan	12 bulan	114.907.350	135.000.000
1.06.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Palangka Raya						Jumlah bahan bacaan yang tersedia	1000 eksemplar	140.000.000	150.000.000
1.06.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Palangka Raya						Jumlah tamu yang terfasilitasi		20.000.000	50.000.000
1.06.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	Provinsi Kalimantan Tengah dan luar daerah						Jumlah koordinasi dan konsultasi yang terlaksanaan	14 kab/kota	400.842.650	370.842.550

1.06.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Palangka Raya						Jumlah sistem berbasis elektronik yang tersedia	1 aplikasi	30.000.000	30.000.000
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah					Tersedianya BMD penunjang	3 unit			3.499.228.000	4.400.000.000
.06.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							Jumlah kendaraan dinas yang disediakan untuk operasional	2 Unit	550.000.000	600.000.000
1.06.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Palangka Raya						Jumlah bangunan yang dibangun	1 unit	2.549.228.000	3.000.000.000
1.06.01.1.07.10	Pengadaan Sarana & Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Palangka Raya						Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	1 paket	400.000.000	800.000.000
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah				2.517.899.800	2.620.000.000
1.06.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Palangka Raya						Tersedianya jasa surat menyurat	1.560 lembar	16.000.000	20.000.000

1.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Palangka Raya								Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	12 bulan	583.333.000	600.000.000
1.06.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Palangka Raya								Tersedianya jasa layanan umum kantor	12 bulan	1.918.566.800	2.000.000.000
1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah							Jumlah BMD yang mendapatkan pemeliharaan				995.000.000	2.500.000.000
1.06.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Palangka Raya								Jumlah kendaraan operasional yang dibayar pajaknya	27 Unit	300.000.000	300.000.000
1.06.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor & Bangunan Lainnya	Palangka Raya								Jumlah gedung/bangunan yang dipelihara	1 Unit	600.000.000	2.000.000.000
1.06.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana & Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Palangka Raya								Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara	12 Bulan	95.000.000	200.000.000

1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial				Jumlah Karang Taruna, LKS, TKSK	25 Lembaga					859.040.551	894.730.947
1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1(satu) daerah Provinsi				Terlaksananya pengawasan pengumpulan sumbangan lintas daerah	14 Kab/Kota					50.000.000	50.000.000
1.06.02.1.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang dan Barang							Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengawasan penerbitan UGB dan PUB		14 Kab/Kota	50.000.000	50.000.000
1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi				Jumlah PSKS yang diberdayakan	1 Lembaga					779.040.551	844.730.947
1.06.02.1.02.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi							Jumlah PSM yang mendapatkan pembinaan		1 Lembaga	54.487.847	54.487.847
1.06.02.1.02.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi							Jumlah TKSK yang mendapatkan pembinaan		136 orang	190.243.100	190.243.100

1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial				140 Orang	Jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti					6.157.766.952	6.384.075.800
1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti					Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang Mendapatkan Pelayanan dalam Panti	20 Orang				1.001.758.300	1.067.192.300
1.06.04.1.01.01	Penyediaan Permakanan								Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan permakanan	20 Orang	350.420.000	380.420.000
1.06.04.1.01.02	Penyediaan Sandang								Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan sandang	20 Orang	24.900.000	24.900.000

1.06.04.1.01.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti								Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	20 Orang	20.000.000	30.000.000
1.06.04.1.01.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual & Sosial		Palangka Raya						Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental dan Sosial	20 Orang	45.750.000	45.750.000
1.06.04.1.01.07	Pemberian Aktivitas Hidup Sehari-hari		Palangka Raya						Jumlah Penyandang Disabilitas dalam Panti yang dapat melaksanakan aktivitas hidup sehari-hari	20 Orang	54.500.000	54.500.000
1.06.04.1.01.08	Fasilitasi pembuatan NIK bagi Penyandang Disabilitas		Palangka Raya						Jumlah Penyandang Disabilitas dalam Panti yang dapat Fasilitas Pembuatan NIK	20 Orang	1.750.000	1.750.000
1.06.04.1.01.09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar		Palangka Raya						Jumlah Penyandang Disabilitas dalam panti yang dapat mengakses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	20 Orang	91.325.000	91.325.000

1.06.04.1.01.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Palangka Raya						Jumlah Penyandang Disabilitas dalam Panti yang dapat ditemukan keluarganya	20 Orang	27.184.000	27.184.000	27.184.000
1.06.04.1.01.12	Koordinasi & Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Palangka Raya						Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	1 Laporan	385.962.300	585.962.300	585.962.300
1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar dalam Panti						Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan Pelayanan dalam Panti	40 Orang		3.301.416.302	3.446.486.650	3.446.486.650
1.06.04.1.02.01	Pengasuhan	Palangka Raya						Jumlah Anak Terlantar dalam Panti yang mendapatkan pengasuhan	40 Orang	88.758.300	88.758.300	88.758.300

	1.06.04.1.02.02	Penyediaan Makan	Palangka Raya							Jumlah Anak Terlantar dalam Panti yang mendapatkan permakanan	40 Orang	2.914.197.102	2.914.197.102
	1.06.04.1.02.03	Penyediaan Sandang	Palangka Raya							Jumlah Anak Terlantar dalam Panti yang mendapatkan sandang	40 Orang	20.000.000	20.000.000
	1.06.04.1.02.04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Palangka Raya							Jumlah Asrama yang mudah diakses	40 Orang	16.370.000	16.370.000
	1.06.04.1.02.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Palangka Raya							Jumlah Anak Terlantar dalam Panti yang mendapatkan pelayanan kesehatan	40 Orang	4.868.514	4.868.514
	1.06.04.1.02.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Palangka Raya							Jumlah Anak Terlantar dalam Panti yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	40 Orang	11.400.000	11.400.000

1.06.04.1.02.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Palangka Raya							Jumlah Anak Terlantar dalam Pantu yang mendapatkan pengasuhan	40 Orang	35.975.000	35.975.000
1.06.04.1.02.09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Palangka Raya							Jumlah Anak Terlantar dalam Pantu yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	40 Orang	2.200.000	2.200.000
1.06.04.1.02.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Palangka Raya							Jumlah Anak Terlantar dalam Pantu yang dapat ditemukan keluarganya	40 Orang	41.191.200	45.000.000
1.06.04.1.02.11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Palangka Raya							Jumlah Anak Terlantar dalam Pantu yang dapat kembali ke keluarga	40 Orang	41.272.000	42.000.000

	1.06.04.1.02.12	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	Palangka Raya						Jumlah Anak Terlantar dalam Panti yang mendapatkan pengasuhan	40 Orang	10.500.000	10.500.000
	1.06.04.1.02.13	Koordinasi, Sinkronisasi & Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Palangka Raya						Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	1 Laporan	114.684.000	114.684.000
	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar dalam Panti						Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang Mendapatkan Pelayanan dalam Panti		80 Orang	1.245.982.500	1.245.982.500
	1.06.04.1.03.01	Penyediaan Permakanan	Palangka Raya						Jumlah Lanjut Usia dalam Panti yang Mendapatkan Permakanan	65 Orang	736.700.000	736.700.000

	1.06.04.1.03.02	Penyediaan Sandang	Palangka Raya							Jumlah Lanjut Usia dalam Panti yang Mendapatkan Sandang	65 Orang	49.800.000	49.800.000
	1.06.04.1.03.03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Palangka Raya							Jumlah Asrama yang mudah diakses	65 Orang	47.367.000	47.367.000
	1.06.04.1.03.04	Penyediaan Alat Bantu	Palangka Raya							Jumlah Lanjut Usia dalam Panti yang Mendapatkan Alat Bantu	65 Orang	9.000.000	9.000.000
	1.06.04.1.03.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Sosial	Palangka Raya							Jumlah Lanjut Usia dalam Panti yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	65 Orang	26.000.000	26.000.000
	1.06.04.1.03.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Palangka Raya							Jumlah Lanjut Usia dalam Panti yang Mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	65 Orang	21.000.000	21.000.000

	1.06.04.1.03.11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Palangka Raya						Jumlah Lanjut Usia dalam Panti yang Dapat Kembali ke Keluarga	65 Orang	72.275.000	72.275.000
	1.06.04.1.03.12	Pemulasaraan	Palangka Raya						Jumlah Lanjut Usia dalam Panti yang dimakamkan	10 Orang	49.580.000	49.580.000
	1.06.04.1.03.13	Koordinasi, Sinkronisasi & Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	Palangka Raya						Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	1 Laporan	129.106.500	129.106.500
	1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis dalam Panti	Palangkaraya				Jumlah Gelandangan dan pengemis yang Mendapatkan Pelayanan dalam Panti	6 Orang			111.550.000	111.550.000
	1.06.04.1.04.01	Penyediaan Permakanan	Palangkaraya						Jumlah PPKS dalam Panti yang Mendapatkan Permakanan	6 Orang	35.400.000	35.400.000

1.06.04.1.04.02	Penyediaan Sandang	Palangkaraya						Jumlah PPKS dalam Panti yang Mendapatkan Sandang	6 Orang	8.000.000	8.000.000
1.06.04.1.04.04	Penyediaan Perbekalan Kesehatan didalam panti sosial	Palangkaraya						Jumlah PPKS dalam Panti yang Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	6 Orang	2.000.000	2.000.000
1.06.04.1.04.05	Pemberian bimbingan fisik, Mental, Spiritual dan sosial	Palangkaraya						Jumlah PMKS dalam Panti yang Mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	6 Orang	5.250.000	5.250.000
1.06.04.1.04.010	Pemulangan ke Daerah Asal	Palangkaraya						Jumlah PMKS dalam Panti yang Pulang ke Daerah Asal	6 Orang	60.900.000	60.900.000
1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya di Luar HIV/AIDS & NAPZA di Dalam Panti						Jumlah PMKS yang Mendapatkan Pelayanan dalam Panti	20 Orang		497.246.850	603.796.850

	1.06.04.1.05.01	Penyediaan Permakanan	Palangka Raya						Jumlah PMKS dalam Panti yang Mendapatkan Permakanan	20 Orang	100.690.250	133.090.250
	1.06.04.1.05.02	Penyediaan Sandang	Palangka Raya						Jumlah PMKS dalam Panti yang Mendapatkan Sandang	20 Orang	18.000.000	23.000.000
	1.06.04.1.05.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Palangka Raya						Jumlah PMKS dalam Panti yang Mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	20 Orang	46.390.000	51.640.000
	1.06.04.1.05.06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Palangka Raya						Jumlah PMKS dalam Panti yang Mendapatkan Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	20 Orang	70.466.600	70.466.600

1.06.05.1.01.01	Pengangkatan Anak antar WNI	Palangkaraya							17.137.635	17.137.635
1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi					Jumlah Fakir Miskin yang Mendapatkan Pelayanan			1.066.716.762	1.600.000.000
1.06.05.1.02.01	Fasilitasi Bantuan Kesejahteraan Keluarga	Prov. Kalteng						Jumlah fasilitas kesejahteraan keluarga	300.000.000	500.000.000
1.06.05.1.02.02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Prov. Kalteng						Jumlah pengelolaan data fakir miskin lintas Kabupaten/Kota	511.922.292	800.000.000
1.06.05.1.02.03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Prov. Kalteng						Jumlah Keluarga Miskin yang Mendapatkan Bantuan	254.794.470	300.000.000
1.06.06	Program Penanganan Bencana				Jumlah Korban Bencana yang Ditangani	100 Orang			5.437.352.709	5.950.000.000
1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi					Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan Pelayanan	100 Orang		5.437.352.709	5.950.000.000

1.06.06.1.01.01	Penyediaan Permukiman	Prov.Kalteng						Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan Permukiman	4.140 Orang	1.100.000.000	1.100.000.000
1.06.06.1.01.02	Penyediaan Sandang	Prov.Kalteng						Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan sandang	4.140 Orang	1.050.000.000	1.050.000.000
1.06.06.1.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Prov.Kalteng						Jumlah penyediaan tempat penampungan pengungsi	14 kab/kota	450.000.000	450.000.000
1.06.06.1.01.04	Penanganan Khusus Kelompok Rentan	Prov.Kalteng						Jumlah penanganan khusus kelompok rentan	14 Kab/Kota	850.000.000	850.000.000
1.06.06.1.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Palangka Raya						Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan Dukungan Psikososial	4.140 Orang	1.987.352.709	2.500.000.000
1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan				1 TMP	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dikelola				183.600.000	375.000.000

	1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi							1 TMP		183.600.000	375.000.000
	1.06.07.1.01.01	Rehabilitasi Sarana & Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Palangka Raya							Jumlah Taman Makam Pahlawan yang direhabilitasi	102.000.000	200.000.000
	1.06.07.1.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Palangka Raya							Jumlah Taman Makam Pahlawan yang mendapatkan pemeliharaan	81.600.000	175.000.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Kepada Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan melalui proses :

- a. Musrembang tingkat desa
- b. Musrembang tingkat kecamatan
- c. Musrembang tingkat kabupaten
- d. Musrembang tingkat provinsi
- e. Informasi dari masyarakat, PSM, Ormas, Orsos serta instansi lain tentang permasalahan sosial yang terjadi
- f. Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan yang ada pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah
- g. Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan yang ada pada Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk melaksanakan kegiatan dan program di Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah
- h. Mensosialisasikan dan mengkoordinir kegiatan pihak swasta, masyarakat, PSM, Ormas, Tagana, Orsos dan pihak-pihak yang peduli terhadap pembangunan sosial.

Kajian usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan bagian dari kegiatan penjangkaran aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap kegiatan pembangunan yang direncanakan, sebagai representasi kebutuhan masyarakat.

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditunjukkan kepada Perangkat Daerah Provinsi berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten/Kota (bila sudah dilakukan).

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Provinsi Kalimantan Tengah

NO	NAMA KEGIATAN	USULAN	LOKASI	VOL/SATUAN	JUMLAH PAGU
1	Penebitan dan pengumpulan izin sumbangan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah provinsi	Sosialisasi dan Pengawasan	9 kecamatan di Barito Utara	9 Kegiatan	150.000.000
2	Pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial Provinsi	Sosialisasi dan Evaluasi Potensi Pekerja Sosial masyarakat	9 kecamatan di Barito Utara	9 Kegiatan	200.000.000
3	Pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial Provinsi	Pembinaan dan monitoring peningkatan kemampuan potensi TKSK dan bantuan transport TKSK kecamatan di Kabupaten	9 kecamatan di Barito Utara	9 Kegiatan	200.000.000
4	Pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial Provinsi	Pembinaan, monitoring dan sosialisasi	9 kecamatan di Barito Utara	9 Kegiatan	110.000.000
5	Pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial Provinsi	Sosialisasi dan Evaluasi Pengawasan	9 kecamatan di Barito Utara	9 Kegiatan	120.000.000
6	Rehabilitasi Sosial bagi PMKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam panti	Rehab Sosial ODGJ	9 kecamatan di Barito Utara	9 Kegiatan	200.000.000
7	Pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial Provinsi	Pelatihan/Pembinaan Bimtek Bagi Karang Taruna	Kec. Damang Batu Kab Gunung Mas	20 Orang/Paket	20.000.000
8	Pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial Provinsi	Pelatihan Perbengkelan/otomotif	Kec. Damang Batu Kab Gunung Mas	10 Orang	40.000.000
9	Pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial Provinsi	Pelatihan Perbengkelan/otomotif	Sepang Kota Kab Gunung Mas	5 orang	20.00.000
10	Pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial Provinsi	Pelatihan tata rias dan menjahit	Sepang Kota Kab Gunung Mas	10 orang	40.000.000
11	Pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial Provinsi	Pelatihan tata rias dan menjahit	Desa tumbang tariak kec.Kurun Kab Gunung Mas	10 orang	40.000.000
12	Pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan	Pelatihan Perbengkelan/otomotif	Desa Tumbang Sian Kec.	8 orang	32.000.000

	social Provinsi		Kahayan Hulu Utara Kab Gunung Mas		
13	Pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan social Provinsi	Pelatihan Perbengkelan/otomotif	Desa Rababang Kec. Rungan barat Kab Gunung Mas	10 orang	40.000.000
14	Pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan social Provinsi	Pelatihan Tata Rias	Kel. Kampuri Kec. Mihing Raya Kab Gunung Mas		
15	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar dalam panti	Bantuan kursi roda 1 buah dan tongkat 4 buah	Desa Rumbang Tuwe Kec. Rungan Hulu Kab. Gunung Mas	5 orang	4.3250.000
16	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Bantuan Sosial yang terkena dampak bencana	Sepang Kota Kab Gunung Mas	10 orang	20.000.000
17	Pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan social Provinsi	Pemberian insentif untuk pendamping BPNT	13 Kecamatan di Katingan	156 orang/bulan	46.800.000
18	Pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan social Provinsi	Pengadaan APD untuk petugas dan pendamping BPNT	13 Kecamatan di Katingan	20 Paket	40.000.000

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan nasional terkait dengan kewenangan Kementerian Sosial RI diarahkan pada penanganan masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang komprehensif, internal lembaga maupun eksternal lembaga sebagai bentuk pengabdian terhadap bangsa dan negara.

Kebijakan Kementerian Sosial dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial sebagaimana ketentuan RPJMN 2015-2025 diarahkan untuk :

1. Meningkatkan dan pemeratakan pelayanan sosial yang adil, dalam arti bahwa setiap orang khususnya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) berhak memperoleh pelayanan sosial.
2. Meningkatkan profesionalisme SDM kesejahteraan sosial berbasis pekerjaan sosial dalam penanganan masalah dan potensi kesejahteraan sosial.
3. Memantapkan manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta koordinasi.
4. Menciptakan iklim dan system yang mendorong peningkatan dan pengembangan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
5. Mendukung terlaksananya kebijakan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembangunan berdasarkan keberagaman dan keunikan nilai sosial budaya serta mengedepankan potensi dan sumber keluarga dan masyarakat setempat.

Sedangkan tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

- a. Melindungi PMKS dari segala resiko sosial, perlakuan salah, tindak kekerasan dan eksploitasi sosial.
- b. Terwujudnya aksesibilitas PMKS dalam pemenuhan kebutuhan sosial dasar;
- c. Terwujudnya mekanisme jaminan sosial berbasis komunitas dalam pengelolaan resiko kehilangan atau penurunan pendapatan berbasis kontribusi (iuran);
- d. Terjaminnya PMKS yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi untuk mendapatkan jaminan sosial melalui pembayaran iuran jaminan sosial oleh pemerintah;

- e. Terjaminnya penghargaan bagi pejuang perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan;
- f. Terjaminnya penyandang disabilitas, lanjut usia non potensial, eks penderita kronis dan penyandang psikotik dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang layak;
- g. Terwujudnya masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan dasarnya;
- h. Tersedia, terjangkau dan terjaminnya pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di semua propinsi, kabupaten dan kota.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Jenis Pelayanan Dasar dan Indikator SPM Bidang Sosial.

Berdasarkan Permensos No 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah, Jenis Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial di Provinsi terdiri atas:

- a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di dalam Panti Sosial;
- b. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di dalam Panti Sosial;
- c. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di dalam Panti Sosial;
- d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti Sosial; dan
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Provinsi.

Pada kebijakan umum pembangunan daerah dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 terdapat program pembangunan yang terkait dengan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dengan Indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

1. Sarana Sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi sosial
2. PMKS yang memperoleh bantuan sosial
3. Potensi sumber kesejahteraan sosial

4. Jumlah fakir miskin yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar
5. Jumlah fakir miskin yang meningkat kemampuannya dalam pemenuhan hak dasar secara inklusivitas.

Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2023 disusun dengan mencermati perolehan keberhasilan pembangunan Tahun 2023 dan perkiraan pencapaian hasil pembangunan serta mempertimbangkan permasalahan dan tantangan pada Tahun 2023.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD

Tujuan yang ingin diwujudkan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023 disesuaikan dengan Renstra Dinas Sosial Tahun 2021-2026, penjabarannya adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Penanganan PPKS
- b. Meningkatnya Peran serta PSKS dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial
- c. Terpenuhinya Pemberian Bantuan Bagi Masyarakat Miskin

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Adapun sasaran yang diemban oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah adalah Peningkatan pemberian layanan sosial bagi PMKS yang memerlukan pelayanan sosial dan PSKS yang diberdayakan melalui :

- a. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Peningkatan pelayanan bagi PMKS yang memerlukan pelayanan
- b. Peningkatan pelayanan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
- c. Pemberian bantuan ekonomi produktif bagi fakir miskin
- d. Penanganan sosial bagi fakir miskin
- e. Pengelolaan dan pemanfaatan Basis Data Terpadu dalam rangka mendukung intervensi penanggulangan kemiskinan lintas sektor
- f. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat miskin yang belum memperoleh intervensi program penanggulangan kemiskinan

- g. Meningkatkan partisipasi sosial dan kualitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial
- h. Meningkatkan upaya masyarakat dan lembaga sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial
- i. Meningkatkan kepedulian sosial masyarakat terhadap permasalahan sosial yang ada di lingkungannya

3.3 Program dan Kegiatan

Pada Tahun 2023 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah memiliki 7 Program, 19 kegiatan dan 88 sub kegiatan.

Program yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 berdasarkan sumber dana APBD Provinsi meliputi program pengentasan kemiskinan yang menjadi Program Prioritas daerah serta Program Rehabilitasi Sosial dan Penanganan bencana alam dan bencana sosial yang menjadi program wajib pelayanan dasar yang harus dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah sebagai instansi pelaksana Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

NO	PROGRAM		KEGIATAN	SUB KEGIATAN	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	1	Perencanaan, Penganggaran & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah
				2	Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi SKPD
				3	Evaluasi Kinerja SKPD
		2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN
				2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

				2	Penatausahaan Barang Milik daerah SKPD
		4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	Diklat Kepegawaian berdasarkan Tugas & Fungsi
				2	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
				3	Bimbingan Tekns Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
				4	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
		5	Administrasi Umum Pemerintah Daerah	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				2	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor
				3	Pengadaan Barang Cetakan & Penggandaan
				4	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan
				5	Fasilitasi Kunjungan Tamu
				6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD
				7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
		6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	1	Pengadaan Kendaraan Dinas
				2	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				3	Pengadaan Sarana & Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

		7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan
				2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor & Bangunan Lainnya
				3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana & Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2	Program Pemberdayaan Sosial	9	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan PUB dan UGB
				2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi
				3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi
				4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Kewenangan Provinsi
3	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	10	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke

					Daerah Kabupaten/Kota Asal
4	Program Rehabilitasi Sosial	11	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti	1	Penyediaan Permakanan
				2	Penyediaan Sandang
				3	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
				4	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual & Sosial
				5	Pemberian Aktivitas Hidup Sehari-hari
				6	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
				7	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
				8	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
				9	Koordinasi & Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar
		12	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar dalam Panti	1	Pengasuhan
				2	Penyediaan Makanan
				3	Penyediaan Sandang
				4	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
				5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti
				6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial

				7	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari
				8	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
				9	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
				10	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
				11	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti
				12	Koordinasi, Sinkronisasi & Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti
		13	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia dalam Panti	1	Penyediaan Makanan
				2	Penyediaan Sandang
				3	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
				4	Penyediaan Alat Bantu
				5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Sosial
				6	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
				7	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari
				8	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas
				9	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

				10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
				11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
				12	Pemulasaraan
		14	Rehabilitasi Sosial dasar Gelandangan dan pengemis dalam Pant	1	Penyediaan Makana
				2	Penyediaan Sandang
				3	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam panti
				4	Pemberian Bimbingan fisik, mental, Spiritual dan Sosial
				5	Pemulangan Ke Daerah asal
		15	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA dalam Pant	1	Penyediaan Makanan
				2	Penyediaan Sandang
				3	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
				4	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari
				5	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
				6	Pemulangan ke Daerah Asal
				7	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar bagi PMKS Lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA

5	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	16	Pengakatan Anak antar WNI dan Peangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	1	Pengakatan Anak antar WNI
		17	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	1	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
				2	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota
				3	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
6	Program Penanganan Bencana	18	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	1	Penyediaan Permakanan
				2	Pelayanan Dukungan Psikososial
				3	Penyediaan Sandang
				4	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
				5	Penanganan Khusus Kelompok Rentan
7	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	19	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi
				2	Pemeliharaan TMP Nasional Provinsi

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perubahan yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 berdasarkan sumber dana APBD Provinsi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Tabel Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja								Kebutuhan Pagu Tahun 2023	KET
					Capaian Program		Keluaran kegiatan		Keluaran Sub Kegiatan		Pagu Tahun 2023	Kebutuhan Pagu Tahun 2023		
					Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
1	1.06	Sosial	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi			Terlaksananya administrasi penunjang urusan pemerintah daerah						36.569.249.100	40.072.439.357		
	1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran & Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja				250.000.000	300.000.000		

1.06.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah	Palangka Raya					Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	5 dokumen	25.000.000	25.000.000
1.06.01.1.01.06	Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi SKPD	Palangka Raya					Jumlah Laporan Capaian Kinerja yang tersusun	5 laporan	25.000.000	25.000.000
1.06.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja SKPD	Palangka Raya					Jumlah Laporan Evaluasi yang tersusun	14 Kab/Kota	200.000.000	250.000.000
1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					12 bulan			14.117.293.084	14.117.293.084
1.06.01.1.02.01	Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN	Palangka Raya					Tersalurkannya gaji dan tunjangan ASN	12 bulan	13.783.929.840	13.783.929.840
1.06.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Palangka Raya					Tersedianya administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 bulan	333.363.244	333.363.244

1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah											70.000.000	70.000.000
1.06.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD										Tersedianya pengamanan BMD	12 bulan	15.000.000
1.06.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD										Tersedianya Penatausahaan BMD	12 Bulan	55.000.000
1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Palangka Raya						Tertaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah		300.000.000
1.06.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				Palangka Raya						Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	3 dokumen	-
1.06.01.1.05.09	Diklat Kepegawaian berdasarkan Tugas & Fungsi				Palangka Raya						Jumlah ASN yang mengikuti diklat	20 orang	100.000.000
1.06.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan				Palangka Raya						Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan	100 Orang	200.000.000
													400.000.000

1.06.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Palangka Raya							Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	-	80.000.000
1.06.01.1.06	Administrasi Umum Pemerintah Daerah							12 bulan	Terlaksananya administrasi umum pemerintah daerah		940.750.000	1.035.842.650
1.06.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Palangka Raya							Jumlah komponen listrik yang tersedia	12 bulan	115.000.000	175.000.000
1.06.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Palangka Raya							Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	12 bulan	120.000.000	125.000.000

1.06.01.1.06.05	Pengadaan Barang Cetakan & Penggandaan								Jumlah barang cetakan & penggandaan	12 bulan	129 114.907.350	135.000.000
1.06.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Palangka Raya							Jumlah bahan bacaan yang tersedia	1000 eksemplar	140.000.000	150.000.000
1.06.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Palangka Raya							Jumlah tamu yang terfasilitasi		20.000.000	50.000.000
1.06.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	Provinsi Kalimantan Tengah dan luar daerah							Jumlah koordinasi dan konsultasi yang terlaksanaan	14 kab/kota	400.842.650	370.842.650
1.06.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Palangka Raya							Jumlah sistem berbasis elektronik yang tersedia	1 aplikasi	30.000.000	30.000.000
1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah							Tersedianya BMD penunjang			3.499.228.000	4.400.000.000

.06.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							Jumlah kendaraan dinas yang disediakan untuk operasional	2 Unit	550.000.000	600.000.000
1.06.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							Jumlah bangunan yang dibangun	1 unit	2.549.228.000	3.000.000.000
1.06.01.1.07.10	Pengadaan Sarana & Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							Jumlah sarana dan prasarana yang tersedia	1 paket	400.000.000	800.000.000
1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah		2.517.899.800	2.620.000.000
1.06.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							Tersedianya jasa surat menyurat	1.560 lembar	16.000.000	20.000.000
1.06.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	12 bulan	583.333.000	600.000.000
1.06.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							Tersedianya jasa layanan umum kantor	12 bulan	1.918.566.800	2.000.000.000

1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perunjang Urusan Perangkat Daerah							Jumlah BMD yang mendapatkan pemeliharaan				995.000.000	2.500.000.000
1.06.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Palangka Raya							Jumlah kendaraan operasional yang dibayar pajaknya	27 Unit		300.000.000	300.000.000
1.06.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor & Bangunan Lainnya	Palangka Raya							Jumlah gedung/bangunan yang dipelihara	1 Unit		600.000.000	2.000.000.000
1.06.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana & Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Palangka Raya							Jumlah sarana dan prasarana yang dipelihara	12 Bulan		95.000.000	200.000.000
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial					25 Lembaga	Jumlah Karang Taruna, LKS, TSKK					859.040.551	894.730.947
1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah							Terlaksananya pengawasan pengumpulan sumbangan lintas daerah	14 Kab/Kota			50.000.000	50.000.000

1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial				Jumlah PMKS yang mendapatkan pelayanan dalam panti	140 Orang						6.157.766.952	6.384.075.800	
1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Tertantar di Dalam Panti				Jumlah Penyandang Disabilitas Tertantar yang Mendapatkan Pelayanan dalam Panti	20 Orang						1.001.758.300	1.067.192.300	
1.06.04.1.01.01	Penyediaan Permakanan			Palangka Raya					Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan permakanan	20 Orang		350.420.000	380.420.000	
1.06.04.1.01.02	Penyediaan Sandang			Palangka Raya					Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan sandang	20 Orang		24.900.000	24.900.000	

1.06.04.1.01.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti									20 Orang	20.000.000	30.000.000	
1.06.04.1.01.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual & Sosial		Palangka Raya							20 Orang	45.750.000	45.750.000	
1.06.04.1.01.07	Pemberian Aktivitas Hidup Sehari-hari		Palangka Raya							20 Orang	54.500.000	54.500.000	

1.06.04.1.01.08	Fasilitas Pembuatan NIK bagi Penyandang Disabilitas	Palangka Raya							Jumlah Penyandang Disabilitas dalam panti yang dapat Fasilitas Pembuatan NIK	20 Orang	1.750.000	1.750.000	1.750.000
1.06.04.1.01.09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Palangka Raya							Jumlah Penyandang Disabilitas dalam panti yang dapat mengakses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	20 Orang	91.325.000	91.325.000	91.325.000
1.06.04.1.01.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Palangka Raya							Jumlah Penyandang Disabilitas dalam Panti yang dapat ditemukan keluarganya	20 Orang	27.184.000	27.184.000	27.184.000
1.06.04.1.01.11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Palangka Raya							Jumlah Penyandang Disabilitas dalam Panti yang dapat kembali ke keluarga	20 Orang	27.151.000	27.151.000	27.151.000

1.06.04.1.01.12	Koordinasi & Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Palangka Raya							1 Laporan	385.962.300	585.962.300
1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar dalam Panti				Jumlah Anak Terlantar yang mendapatkan Pelayanan dalam Panti	40 Orang				3.301.416.302	3.446.486.650
1.06.04.1.02.01	Pengasuhan	Palangka Raya							40 Orang	88.758.300	88.758.300
1.06.04.1.02.02	Penyediaan Makan	Palangka Raya							40 Orang	2.914.197.102	3.059.267.450

1.06.04.1.02.03	Penyediaan Sandang	Palangka Raya							Jumlah Anak Terlantar dalam Panti yang mendapatkan sandang	40 Orang	20.000.000	20.000.000
1.06.04.1.02.04	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Palangka Raya							Jumlah Asrama yang mudah diakses	40 Orang	16.370.000	16.370.000
1.06.04.1.02.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti	Palangka Raya							Jumlah Anak Terlantar dalam Panti yang mendapatkan pelayanan kesehatan	40 Orang	4.868.514	4.868.514
1.06.04.1.02.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Palangka Raya							Jumlah Anak Terlantar dalam Panti yang mendapatkan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	40 Orang	11.400.000	11.400.000

1.06.04.1.02.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Palangka Raya						Jumlah Anak Terlantar dalam Panti yang mendapatkan pengasuhan	40 Orang	35.975.000	35.975.000
1.06.04.1.02.09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Palangka Raya						Jumlah Anak Terlantar dalam Panti yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	40 Orang	2.200.000	2.200.000
1.06.04.1.02.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Palangka Raya						Jumlah Anak Terlantar dalam Panti yang dapat ditemukan keluarganya	40 Orang	41.191.200	45.000.000
1.06.04.1.02.11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Palangka Raya						Jumlah Anak Terlantar dalam Panti yang dapat kembali ke keluarga	40 Orang	41.272.000	42.000.000

1.06.04.1.02.12	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	Palangka Raya							40 Orang	10.500.000	10.500.000	
1.06.04.1.02.13	Koordinasi, Sinkronisasi & Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	Palangka Raya							1 Laporan	114.684.000	114.684.000	
1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar dalam Panti						80 Orang	Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang Mendapatkan Pelayanan dalam Panti		1.245.982.500	1.245.982.500	
1.06.04.1.03.01	Penyediaan Permakanan	Palangka Raya						Jumlah Lanjut Usia dalam Panti yang Mendapatkan Permakanan	65 Orang	736.700.000	736.700.000	

1.06.04.1.03.02	Penyediaan Sandang	Palangka Raya							Jumlah Lanjut Usia dalam Panti yang Mendapatkan Sandang	65 Orang	49.800.000	49.800.000
1.06.04.1.03.03	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Palangka Raya							Jumlah Asrama yang mudah diakses	65 Orang	47.367.000	47.367.000
1.06.04.1.03.04	Penyediaan Alat Bantu	Palangka Raya							Jumlah Lanjut Usia dalam Panti yang Mendapatkan Alat Bantu	65 Orang	9.000.000	9.000.000
1.06.04.1.03.05	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti Sosial	Palangka Raya							Jumlah Lanjut Usia dalam Panti yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	65 Orang	26.000.000	26.000.000

1.06.04.1.03.06	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Palangka Raya						Jumlah Lanjut Usia dalam Panti yang Mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	65 Orang	21.000.000	21.000.000
1.06.04.1.03.07	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Palangka Raya						Jumlah Lanjut Usia dalam Panti yang Mendapatkan Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	65 Orang	7.500.000	7.500.000
1.06.04.1.03.08	Fasilitasi Pembuatan NIK bagi Penyandang Disabilitas	Palangka Raya						Jumlah Lanjut Usia dalam Panti yang Mendapatkan NIK	65 Orang	5.440.000	5.440.000
1.06.04.1.03.09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Palangka Raya						Jumlah Lanjut Usia dalam Panti yang Mendapatkan Layanan	65 Orang	20.400.000	20.400.000

1.06.04.1.03.10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Palangka Raya							Pendidikan dan Kesehatan	65 Orang	71.625.000	71.625.000
1.06.04.1.03.11	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Palangka Raya							Jumlah Lanjut Usia dalam Panti yang Dapat Kembali ke Keluarga	65 Orang	72.275.000	72.275.000
1.06.04.1.03.12	Pemulasaraan	Palangka Raya							Jumlah Lanjut Usia dalam Panti yang diamankan	10 Orang	49.580.000	49.580.000
1.06.04.1.03.13	Koordinasi, Sinkronisasi & Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	Palangka Raya							Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	1 Laporan	129.106.000	129.106.000

1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis dalam Panti							6 orang		111.550.000	111.550.000	
1.06.04.1.04.01	Penyediaan Permakanan								Jumlah PMKS dalam Panti yang Mendapatkan Permakanan	6 Orang	35.400.000	35.400.000
1.06.04.1.04.02	Penyediaan Sandang								Jumlah PMKS dalam Panti yang Mendapatkan Sandang	6 Orang	8.000.000	8.000.000
1.06.04.1.04.04	Penyediaan Perbekalan kesehatan didalam panti								Jumlah PMKS dalam Panti yang Mendapatkan perbekalan kesehatan	6 Orang	2.000.000	2.000.000
1.06.04.1.04.05	Pemberian bimbingan Fisik, Mental, Spiritual Dan Sosial								Jumlah PMKS dalam Panti yang Mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	6 Orang	5.250.000	5.250.000
1.06.04.1.04.010	Pemulangan ke Daerah Asal								Jumlah PMKS dalam Panti yang Pulang ke Daerah Asal	6 Orang	60.900.000	60.900.000

1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya di Luar HIV/AIDS & NAPZA di Dalam Pant					Jumlah PMKS yang Mendapatkan Pelayanan dalam Pant	20 Orang			497.246.850	603.796.850	
1.06.04.1.05.01	Penyediaan Permakanan				Palangka Raya			Jumlah PMKS dalam Pant yang Mendapatkan Permakanan	20 Orang	100.690.250	133.090.250	
1.06.04.1.05.02	Penyediaan Sandang				Palangka Raya			Jumlah PMKS dalam Pant yang Mendapatkan Sandang	20 Orang	18.000.000	23.000.000	
1.06.04.1.05.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				Palangka Raya			Jumlah PMKS dalam Pant yang Mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	20 Orang	46.390.000	51.640.000	

1.06.04.1.05.06	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari	Palangka Raya							20 Orang	70.466.600	70.466.600
1.06.04.1.05.09	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Palangka Raya							20 Orang	5.631.000	7.631.000
1.06.04.1.05.10	Pemulangan ke Daerah Asal	Palangka Raya							20 Orang	76.048.000	134.948.000

1.06.05.1.02.01	Fasilitasi Bantuan Kesejahteraan Keluarga	Prov. Kalteng							14 Kab/Kota	300.000.000	500.000.000	
1.06.05.1.02.02	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Prov. Kalteng							14 Kab/Kota	511.922.292	800.000.000	
1.06.05.1.02.03	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Prov. Kalteng							14 Kab/Kota	254.794.470	300.000.000	
1.06.06	Program Penanganan Bencana				100 Orang	Jumlah Korban Bencana yang Ditangani				5.437.352.709	5.950.000.000	
1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi						Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan Pelayanan	100 Orang		5.437.352.709	5.950.000.000	
1.06.06.1.01.01	Penyediaan Permakanan	Prov. Kalteng							4.140 Orang	1.100.000.000	1.100.000.000	

1.06.06.1.01.02	Penyediaan Sandang	Prov. Kalteng							Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan sandang	4.140 Orang	1.050.000.000	1.050.000.000
1.06.06.1.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Prov. Kalteng							Jumlah penyediaan tempat penampungan pengungsi	14 kab/kota	450.000.000	450.000.000
1.06.06.1.01.04	Penanganan Khusus Kelompok Rentan	Prov. Kalteng							Jumlah penanganan khusus kelompok rentan	14 Kab/Kota	850.000.000	850.000.000
1.06.06.1.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Palangka Raya							Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial yang mendapatkan Dukungan Psikososial	4.140 Orang	1.987.352.709	2.500.000.000
1.06.07	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan						1 TMP	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dikelola			183.600.000	375.000.000

1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi							1 TMP			183.000.000	375.000.000	
1.06.07.1.01.01	Rehabilitasi Sarana & Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Palangka Raya							Jumlah Taman Makam Pahlawan yang direhabilitasi	1 TMP	100.000.000	200.000.000	
1.06.07.1.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Palangka Raya							Jumlah Taman Makam Pahlawan yang mendapatkan pemeliharaan	1 TMP	81.600.000	175.000.000	

BAB V PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan sistem akuntabilitas yang memadai.

Secara umum, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah berusaha merencanakan Program dan Kegiatan yang menjadi penjabaran dari tugas pokok dan fungsinya. Beberapa indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan telah ditetapkan sebagai acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas dalam tahun anggaran 2023. Dengan berpedoman pada Rencana Kerja ini diharapkan kedepan, kualitas pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah dapat ditingkatkan dan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya.

Palangka Raya, Mei 2022

Plt.

Kepala Dinas



Dr. NOOR HALIM, S.Pd., M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19690702 199512 1 003